

EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

Afridona, Zaili Rusli, dan Febri Yuliani

Program Studi Magister Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas, KM. 12,5 Panam Pekanbaru

Abstract: Evaluation of Kampar District Regulation Number 10 of 2011 concerning wallet bird nest tax. The purpose of this study was to analyze the Evaluation of Kampar Regional Regulation Number 10 of 2011 concerning Taxes for Swallow's Nest and analyze the factors that influence it. This study uses a qualitative descriptive research method approach. Primary data is obtained directly through interviews with key informants, namely the Head of the Legal Sub-Section of the Kampar Regent's office, the Head of the Kampar District Revenue Service, the Regional Secretary of Kampar Regency in the 2006-2011 period, Entrepreneurs of swiftlet nest breeding and the communities surrounding swallow nest breeding Secondary data obtained from research documents. The results showed that compliance factors determine the success of the implementation of the Kampar district regulation Number 10 of 2011 concerning swallow nest tax, but the audit in the form of supervision has not been carried out optimally. Factors affecting the Evaluation of Kampar District Regulation Number 10 of 2011 concerning Taxes for Swallow's Nests include the lack of available human resources who have the competence to carry out evaluations, due to the lack of evaluation culture, uneven quality of human resources, inadequate facilities, discipline still low, citizen compliance is still low.

Key words: evaluation, regional regulations, taxes, supervision

Abstrak: Evaluasi Peraturan Daerah kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2011 tentang pajak sarang burung wallet. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Evaluasi Peraturan Daerah Kampar Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dari *key informan*, yaitu Kepala Sub Bagian Hukum kantor Bupati Kampar, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, Seketaris Daerah Kabupaten Kampar priode 2006-2011, Pengusaha penangkaran sarang burung walet dan Masyarakat yang berada di sekitar penangkaran sarang burung walet, Data sekunder diperoleh dari dokumen penelitian. Hasil penelitian menunjukkan faktor kepatuhan menentukan keberhasilan pelaksanaan peraturan daerah kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet, namun audit berupa pengawasan belum dijalankan dengan maksimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet antara lain Kurangnya tersedia sumber daya manusia yang memiliki kompetensi melakukan evaluasi, disebabkan belum terciptanya budaya evaluasi, kualitas sumber daya manusia tidak merata, fasilitas kurang memadai, disiplin masih rendah, kepatuhan warga masih rendah.

Kata kunci: evaluasi, peraturan daerah, pajak, pengawasan

PENDAHULUAN

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang di-amandemen menjadi 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah dibuka saluran baru bagi pemerintahan Provinsi dan Kabupaten / Kota untuk mengambil tanggung jawab yang

lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Agar daerah dapat menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya, perlu sumber keuangan daerah, semakin besar keuangan daerah, maka akan semakin

besar pula kontribusinya terhadap penyelenggaraan usaha-usahanya dalam bidang keamanan, ketertiban umum, sosial, kebudayaan, kesejahteraan, serta pelayanan umum kepada masyarakat, seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah juga memiliki tanggung jawab sendiri untuk mengelola perpajakannya.

Penarikan sumber daya ekonomi melalui pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan aturan hukum yang jelas, yaitu dengan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah sehingga dapat diterapkan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah (Siahaan, 2005), pemerintahan daerah kabupaten Kampar telah membuat sebuah peraturan daerah nomor 10 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan mampu memberi kontribusi yang lebih dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Namun peraturan daerah kabupaten Kampar nomor 10 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet belum dijalankan dengan kata lain peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet tidak berjalan dengan maksimal padahal peraturan daerah tersebut dibuat dari tahun 2011, maka dari itu pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2011 tentang pajak burung walet?.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program, atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut sebagai kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. (Nugroho, 2006).

Wibawa, dkk (2002) mengatakan bahwa kebijakan publik selalu mengandung tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran tersebut. Dalam cara mencapai sasaran tersebut terkandung beberapa komponen lain yakni siapa implementornya, jumlah dan

sumber dana, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dan sistem manajemen dilaksanakan, serta kinerja kebijakan diukur. Di dalam cara ini komponen tujuan yang luas dan sasaran yang spesifik diperjelas dan kemudian diinterpretasikan. Cara-cara mencapai sasaran ini biasa disebut dengan implementasi kebijakan. Menurut Grindle (1980) mengungkapkan bahwa, keseluruhan proses kebijakan baru bisa dimulai bila tujuan umum dari kebijakan tersebut telah ditetapkan, program pelaksanaan telah dibuat, serta dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan. Dalam evaluasi penelitian melakukan penilaian dengan merujuk pada teori Wibawa dalam Nugroho (2011) yaitu eksplanasi, kepatuhan, audit dan akunting. Tujuan penelitian adalah mengetahui evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2011 tentang pajak burung walet.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan analisa kualitatif. Informan penelitian adalah Kepala Sub Bagian Hukum kantor Bupati Kampar, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Periode 2006-2011, pengusaha penangkaran sarang burung walet diwilayah Kabupaten Kampar khususnya di Kecamatan Kampar Utara, masyarakat yang berada di sekitar penangkaran sarang burung walet. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Prosedur analisis mulai dari reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Dengan demikian analisis data dalam penelitian ini mengkaji lebih mendalam mengenai evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet dan faktor-faktor yang mempengaruhi Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.

HASIL

Eksplanasi

Komunikasi merupakan unsur terpenting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Komunikasi menunjukkan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Komunikasi yang dibangun dalam melaksanakan kebijakan pemerintah terhadap objek kebijakan tersebut, sebagai upaya untuk mensosialisasikan kebijakan yang telah ditetapkan. Selain dari pada itu kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet.

Dalam pelaksanaan evaluasi peraturan daerah kabupaten Kampar nomor 10 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan kriteria Evaluasi kebijakan yang disampaikan oleh Wibawa (2002) kinerja pengawasan yang dilakukan belum dijalankan dengan baik hal ini dibuktikan dengan adanya banyaknya penangkaran sarang burung walet yang tidak memiliki izin.

Salah satu hal yang menghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet adalah belum dilakukannya sosialisasi oleh pemerintah kabupaten Kampar terkait adanya pungutan pajak burung walet di wilayah Kabupaten Kampar, Khususnya Di Kecamatan Kampar Utara.

Kepatuhan

Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan. Kepatuhan merupakan tahapan dalam mencari tahu apakah tindakan yang dilakukan petugas dalam pengawasan peraturan daerah kabupaten Kampar nomor 10 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet sudah sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan kebijakan atau aturan yang ditetapkan pelaku usaha atau pemilik penangkaran

sarang burung walet harus patuh terhadap aturan untuk menciptakan keadaan yang sejahtera. Kepatuhan dapat disimpulkan bahwa SOP Pajak Sarang Burung Walet belum dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Kampar.

Audit

Audit Merupakan tahapan mencari tahu apakah pengawasan dalam usaha penangkaran sarang burung walet telah dilakukan terhadap objek pengawasan, serta melihat penyimpangan dan kebocoran yang terjadi dalam pengawasan, sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja mekanisme pengawasan, evaluasi ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggung jawabkan kepada konstituentnya, sejauh mana tujuan dicapai, evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Audit atau pengawasan telah terjadi miskomunikasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan.

Akunting

Dalam tahap ini Evaluasi dituntut untuk mengetahui akibat sosial ekonomi dari kebijakan pemerintah daerah kabupaten Kampar hal ini tidak disertai dengan pengawasan yang maksimal, yang mengakibatkan pertumbuhan penangkaran sarang burung walet sangat pesat khususnya di Kecamatan Kampar Utara tanpa menerapkan standarisasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga aktifitas ini akan mengancam kesehatan dan kenyamanan masyarakat dalam jangka panjang. Namun Sarang Burung Walet ini juga dapat memberikan pemasukan kepada daerah apabila pemungutan pajak burung walet tersebut dilakukan secara efektif

Kurangnya pengawasan dan perhatian pemerintah terhadap penakaran sarang burung walet ini pun sering dimanfaatkan oleh pengusaha sarang burung walet di Kabupaten Kampar. Usaha penangkaran sarang burung walet tanpa pengawasan dari pemerintah ini pun terus berkembang dan meningkat jumlahnya dari hari kehari tanpa memperhatikan kondisi di sekitar, usaha ini sangat me-

nguntungkan bagi pelaku usaha namun berdampak negatif bagi masyarakat, dari segi ekonomi dapat menimbulkan pertumbuhan yang positif karena harga jual dari usaha sarang burung walet tersebut sangat menjanjikan dimana untuk kualitas A di bandrol dengan harga 9-13 juta perkilo, sedangkan untuk golongan B sekitar 6-8 juta perkilo, namun disisi lain karena usaha tersebut belum didampingi atau dibimbing oleh pemerintah dengan baik yang ditandai dengan pengawasan yang dilakukan pemerintah belum maksimal menyebabkan kerugian bagi masyarakat sekitar penangkaran sarang burung walet.

Pertumbuhan penangkaran sarang burung walet sangat pesat khususnya di Kecamatan Kampar Utara tanpa menerapkan standarisasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga aktifitas ini akan mengancam kesehatan dan kenyamanan masyarakat dalam jangka panjang. Namun Sarang Burung Walet ini juga dapat memberikan pemasukan kepada daerah apabila pungutan pajak burung walet tersebut dilakukan secara efektif.

PEMBAHASAN

Evaluasi dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Adalah wajar apabila terdapat adanya kekeliruan-kekeliruan tertentu. Kegagalan-kegagalan dan petunjuk-petunjuk yang tidak efektif hingga terjadi penyimpangan yang tidak diinginkan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Maka oleh karenanya evaluasi perlu dilakukan, tetapi adalah penting untuk mengingat bahwa tujuan pengawasan bersifat positif artinya: evaluasi harus mengusahakan terjadinya hal-hal atau faktor-faktor penghalang dalam aktivitas-aktivitas yang direncanakan yaitu: faktor-faktor yang mempengaruhi Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet adalah Faktor Internal, pada lembaga pemerintah yang berwenang menjalankan tugas peraturan daerah kabupaten Kampar nomor

10 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet. Kurangnya tersedia sumber daya manusia yang memiliki kompetensi melakukan evaluasi, hal ini disebabkan karena belum terciptanya budaya evaluasi. Dalam pengawasan yang merupakan aplikasi dari aktivitas evaluasi terhadap peraturan daerah kabupaten Kampar nomor 10 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet. Pengawasan atau evaluator yang dilakukan dalam penerapan peraturan daerah kabupaten Kampar nomor 10 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet belum terlaksana dengan baik

Sarana dan prasarana merupakan komponen yang mendukung dalam kelancaran proses pengawasan, karena akan mempengaruhi kualitas pelayanan, pelayanan yang berkualitas baik dapat menekan pertumbuhan penangkaran sarang burung walet yang tidak memenuhi standard dan sebaliknya jika pengawasan yang dilakukan belum maksimal; Faktor Eksternal; selain faktor internal, faktor eksternal juga berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam pengimplementasi peraturan daerah kabupaten Kampar nomor 10 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet, bahwa kerjasama yang seharusnya ada di bagian hukum bupati Kampar sebagai pembuat kebijakan dengan dinas pendapatan daerah sebagai pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya suatu kebijakan peraturan daerah kabupaten Kampar nomor 10 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet. Kerjasama akan terbentuk jika adanya koordinasi antara kedua dinas terkait, karena kedua dinas memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi. Untuk melihat bagaimana koordinasi yang telah dilakukan oleh bagian hukum bupati Kampar sebagai pembuat kebijakan dengan dinas pendapatan daerah sebagai pelaksana kebijakan. Selain itu masalah lain juga berasal dari luar organisasi faktor-faktor yang berasal dari pengusaha penangkaran sarang burung walet yang tidak mengikuti aturan tentang izin penangkaran sarang burung walet, dimana terdapat beberapa penangkaran sarang burung walet yang tidak memiliki izin, karena mereka beranggapan

bahwa hal tersebut tidak perlu disamping itu sebagian penangkaran sarang burung walet tidak tahu menahu tentang adanya peraturan daerah kabupaten Kampar nomor 10 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet

Widodo (2010) menjelaskan, bahwa tahap akhir dalam evaluasi kebijakan adalah membuat keputusan nasib dari kebijakan publik. Alternatif nasib kebijakan publik antara lain meliputi: Kebijakan program atau proyek perlu diteruskan, Kebijakan program atau proyek perlu diteruskan dengan suatu perbaikan, Kebijakan program atau proyek perlu direplikasikan di tempat lain atau memperluas berlakunya proyek, Kebijakan program atau proyek harus dihentikan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Kampar perlu diteruskan dengan suatu perbaikan, yaitu: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar sebagai pihak yang menjalankan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet harus lebih gencar melakukan sosialisasi terkait adanya aturan tentang pajak sarang burung walet. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar juga harus melakukan pengawasan yang lebih maksimal terhadap penakar sarang burung walet dengan turun langsung ke lapangan supaya pajak sarang burung walet dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kampar. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar harus melakukan pendataan secara maksimal dan kontinyu agar potensi penerimaan pendapatan asli daerah lebih optimal. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak peraturan daerah harus bertindak tegas bagi pengusaha penangkaran sarang burung walet yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah.

rah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet harus berkoordinasi/komunikasi dengan baik agar tidak terjadi miss komunikasi dalam melaksanakan tugasnya

SIMPULAN

Dalam pelaksanaan evaluasi peraturan daerah kabupaten Kampar nomor 10 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet dengan menggunakan kriteria evaluasi kebijakan ternyata kinerja pengawasan yang dilakukan belum dijalankan dengan baik hal ini dibuktikan dengan adanya banyaknya penangkaran sarang burung walet yang tidak memiliki izin. disamping itu adanya faktor internal kendala keterbatasan personal dalam melakukan pengawasan, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan, kurangnya ketersediaan data yang update, selain faktor internal, faktor eksternal juga mempunyai kendala yaitu kurangnya kontribusi masyarakat dalam implementasi kebijakan, kerjasama yang seharusnya ada di dalam organisasi juga mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya suatu kebijakan.

DAFTAR RUJUKAN

- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Nugroho D. Riant 2008. *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wibawa, Samodra, dkk. 2002. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu